



Sengketa Internasional Indonesia Vs Uni Eropa Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel

Muhammad Renal Anugrah Saputra¹, Muzafar Mukhtar², Muhammad Haikal Akbar³, Al-Qhiani Fadia Putri⁴, Dewi Rahmawati Gustini⁵.

Abstract

Received: 15 Juli 2023
Revised: 20 Agustus 2023
Accepted: 27 Agustus 2023

Natural resources are quite rich in Indonesia, especially in the mining industry. Nickel is one of Indonesia's promising and high-value export commodities. Silvery-white and shiny nickel is a naturally occurring metallic element. Because of its wide distribution within the Earth's core and crust, nickel is the sixth most abundant element. As one of Indonesia's unique mining commodities, nickel has great competitiveness from 2010 to 2020. As a result, the European Union (EU) sued Indonesia in 2020 at the World Trade Organization (WTO) over the ban on nickel ore exports by the Indonesian government as the ban on palm oil exports which was considered to have the most severe environmental damage. Indonesia currently has alternatives related to problems through the WTO provisions, in article XX (g) and also Indonesia can prove that the policy does not harm the European Union.

Keywords: *Nickel Ore Exports, EU Lawsuit, World Trade Organization*

(*) Corresponding Author: renalsaputra184@gmail.com

How to Cite: Saputra, M. R. A, Mukhtar, M, Akbar, M. H, Putri, A. F, & Gustini, D. R. (2023). Sengketa Internasional Indonesia Vs Uni Eropa Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8316041>.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah kegiatan penduduk satu negara yang memperdagangkan produk dan jasa dengan penduduk negara lain..Salah satu ukuran kesehatan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan dan mengatasi masalah adalah perdagangan internasional..Ekspansi ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional terutama di negara-negara berkembang .Indonesia adalah negara dengan jumlah cadangan mineral terbesar diantara negara negara lain, terbukti dengan kontribusinya terhadap berbagai komoditas pertambangan, termasuk emas, timah, nikel, dan tembaga.

Nikel metalik memiliki tampilan putih keperakan dan mengkilap. unsur paling umum kelima di bumi dan didistribusikan secara luas di kerak dan inti bumi. Besi dan nikel keduanya sering menjadi unsur dalam meteorit. Di air dan tanah, nikel dapat ditemukan secara alami. Ini adalah nutrisi penting bagi tanaman juga. Sementara kerak bumi mengandung 80 bagian per juta nikel, inti bumi terutama terbuat dari paduan nikel-besi.

Sumber alami nikel termasuk oksida, sulfida, dan silikat. Kurang lebih logam nikel murni, ferro-nikel, nikel oksida, dan senyawa lainnya adalah semua produk dan kegunaan nikel primer. Produksi global tahunan dan pemanfaatan nikel baru atau primer melebihi dua juta ton.Nikel dapat diekstraksi dari berbagai bijih nikel menggunakan sejumlah metode yang berbeda.Lebih dari 25 negara di seluruh dunia saat ini menambang bijih yang mengandung nikel.

Posisi cadangan nikel, ekspor nikel mentah, dan ekspor nikel olahan secara global dijabarkan dalam *Trade and Industry Brief* edisi 2020. Menurut data terbaru,

Indonesia memegang posisi teratas untuk cadangan nikel dunia, eksplorasi bijih, dan konsentrat nikel. Berdasarkan penelitian, diprediksi pada tahun yang sama, 2020, Indonesia akan memproduksi 30% nikel dunia, atau 800.000 ton, dengan cadangan sebesar 174 ton. Di Eropa peranan nikel sebagai dua belas ekonomi terpenting dengan produksi atau pe'nggunaan nikel yang cukup besar menjalani penilaian sosial ekonomi. Industri nikel dan rantai nilainya diperkirakan telah menambahkan total € 43 miliar ke negara-negara ini. Selain itu, € 130 miliar dalam output yang dihasilkan oleh nikel dan bisnis sekutu (tahun referensi 2017) menyumbang sekitar 750.000 pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada nikel.

Sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar didunia pemerintah Indonesia merasa di diskriminasi oleh Uni Eropa yang menilai bahwa hasil ekspor minyak sawit indonesia merupakan penyumbang signifikan terhadap degradasi lingkungan. Akhirnya sebagaimana balasan dari kebijakan tersebut, pada 1 Januari tahun 2020, pemerintah Indonesia resmi melarang eskpor bijih nikel, dikarenakan volume nikel diekspor sudah terlalu besar, pada saat ini cadangan nikel yang bisa ditambang di Indonesia sekitar 72 juta ton dengan perkiraan 7-8 tahun kedepan dan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap nikel

melalui hirilisasi, kemudian pemerintahan Indonesia mendapat kecaman oleh Uni Eropa dan digugat di WTO.

METODE PENELITIAN

Penelitian jurnal ini merupakan penelitian deskriptif analitis, khususnya penelitian yang merinci keadaan dan fakta seputar larangan ekspor nikel yang menyebabkan gugatan oleh Uni Eropa dalam data Organisasi Perdagangan Dunia yang telah dianalisis menggunakan penolakan terhadap aturan hukum dan perundang-undangan, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis, khususnya penelitian yang menekankan pada data sekunder, khususnya dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum dan metode hukum. Secara positif berasal dari teks-teks hukum yang ditemukan dalam hukum, aturan, dan perjanjian internasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi, dan baik data primer deskriptif maupun data sekunder dikaji dengan prosedur normatif dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produksi nikel di indonesia

Pasar diperkirakan akan tumbuh dari USD 33,31 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 59,14 miliar pada tahun 2028, dengan CAGR sebesar 7,3% selama periode perkiraan. Pasar dibagi menjadi beberapa aplikasi, termasuk stainless steel, baja khusus, baterai, elektroplating, paduan, dan lain-lain. Ada beberapa perusahaan yang berfokus pada produksi nikel, atau peleburan dan pemurnian nikel, yang memulai debut perdagangan mereka di Indonesia jika kita melihat perusahaan Indonesia yang go public pada tahun 2023.

luar biasa dari nikel logam membuatnya menjadi komponen yang diperlukan dalam produk yang tak terhitung jumlahnya. Ferronikel, atau nikel olahan, adalah bentuk penjualan yang paling umum. Sebagian besar ini digunakan dalam paduan untuk membuat baja tahan panas dan tahan karat. Baterai, koin, pelapisan baja besi,

paku, saluran pipa, ponsel, peralatan dapur, TV, dan kompor listrik adalah beberapa contoh produk dengan kandungan nikel.

Wilayah Asia Pasifik memegang pangsa pasar terbesar, didorong oleh industri konstruksi dan otomotif yang berkembang pesat di Cina. Perusahaan besar di pasar termasuk Anglo American, BHP, Vale, dan Eramet. Pasar diperkirakan akan stabil setelah terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19. Konsumsi nikel diperkirakan akan meningkat karena meningkatnya adopsi berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, dan barang-barang konsumsi.

Indonesia masih harus menempuh jalan panjang sebelum produksi nikel menjadi etis. Ketika para pejabat Indonesia mengatakan mereka akan bertemu dengan perwakilan Tesla pada akhir tahun lalu, mereka sebelumnya menghabiskan bertahun-tahun memikat Tesla ke arah logam yang terperangkap di tanah hutan hujan mereka.

Namun, awal tahun ini, Tesla tampaknya memiliki prioritas lain. Perusahaan AS mengadakan negosiasi untuk membeli nikel dari negara kepulauan Pasifik Kaledonia Baru serta untuk membangun mobil di India, menyinggung pengamat pasar bahwa industri nikel Indonesia telah menjadi terlalu berisiko. Meningkatnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dari rantai pasokan perusahaan mungkin sangat sensitif bagi seseorang yang memiliki reputasi untuk membuat produk ramah lingkungan. Risiko-risiko ini semakin memburuk di Indonesia, dan para pelaku bisnis.

B. Potensi Nikel di Indonesia

Pengekspor nikel, memegang hingga 20% dari ekspor nikel global. Pada tahun 2021, Indonesia memproduksi 1 juta metrik ton nikel, atau sekitar 37% dari total produksi dunia sebesar 2,7 juta metrik ton. Namun demikian, meskipun ada larangan ekspor, Indonesia masih dapat memperoleh penghasilan yang signifikan dari ekspor barang yang mengandung nikel, menghasilkan pendapatan \$20,9 miliar pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan pendapatan ekspor berbasis nikel Indonesia tujuh tahun lalu, nilai ini telah naik secara signifikan. Menurut Jokowi, jika Indonesia mempertahankan kepatuhannya terhadap program ini, produk domestik bruto (PDB) akan mencapai \$ 3 triliun pada tahun 2030.

C. Fungsi WTO

Perjanjian Umum Tentang Tarif Dan Perdagangan (GATT) telah dilanjutkan dan dikembangkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perannya adalah bertindak sebagai forum negosiasi, mengatur pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan sengketa perdagangan, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan, dan menetapkan kerangka kerja yang efisien untuk menentukan kebijakan ekonomi global bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Uni Eropa mengajukan gugatan atas penangguhan ekspor bijih nikel ke negara-negara Eropa karena dapat dilihat bahwa peran WTO berguna untuk menafsirkan dan membidik ke arah yang lebih banyak isu mengenai *multilateral trade agreement* (MTAs) dan *plurilateral trade agreement* (PTAs), termasuk mengawasi pelaksanaannya, menyelesaikan sengketa, dan perbedaan pendapat mengenai kesepakatan di masing-masing negara anggota.

D. Latar belakang sengketa pelarangan Ekspor Bijih Nikel ke Eropa

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mengakui Indonesia sebagai salah satu negara, meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, anggota WTO, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan pada tahun 1995. Membangun hubungan perdagangan internasional dengan negara-negara lain, khususnya anggota WTO, dimungkinkan oleh keanggotaan WTO Indonesia. Sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dimulai pada 2018 setelah parlemen menyetujui rencana untuk melarang Mulai tahun 2021, minyak sawit akan digunakan sebagai bahan baku

biodiesel. Selain itu, bertekad untuk meningkatkan efisiensi energi menjadi 35% pada tahun 2030 yang konsisten dengan berfungsinya hubungan perdagangan internasional. Uni Eropa, sebuah negara yang memproduksi biofuel, menetapkan strategi untuk generasi dan promosi energi terbarukan pada tahun 2009. Kebijakan ini dikenal sebagai *Renewable Energy Directive*, atau RED. Akan ada rencana untuk secara bertahap menghapus penggunaan minyak sawit sebagai biofuel di Uni Eropa, mulai tahun 2030, dan mengurangi penggunaan minyak kelapa, sesuai dengan aturan yang didelegasikan yang melengkapi arahan dari Arahan Energi Terbarukan II UE, atau RED II. Karena anggapan bahwa minyak sawit merupakan penyumbang signifikan terhadap degradasi lingkungan, Uni Eropa akan melarang minyak sawit mulai tahun 2024. Pada Juni 2021, Indonesia, salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, memproduksi 58%, atau 44.500 MT. Indonesia memprotes kebijakan tersebut, oleh karena itu sebagai retribusi atas perlakuan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit secara berbeda, pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Keputusan ini dibuat sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menjaga cadangan bijih nikel untuk memasok bahan baku untuk smelter lokal. Karena kekayaan Indonesia dalam mineral, terutama nikel, yang dapat habis dan tidak dapat diregenerasi, strategi ini tidak dapat ditunda.

Sebagai tanggapan, Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO untuk menantang pembatasan ekspor negara itu pada bijih nikel, melepaskan kebijakan perlindungan lingkungannya, dan menolak produk yang terbuat dari minyak sawit Indonesia yang dianggap berbahaya bagi lingkungan. Uni Eropa juga memperbaiki sektor pertambangan, yang selanjutnya merusak lingkungan. Bahan baku nikel adalah komoditas penting karena Uni Eropa memimpin dunia dalam produksi stainless steel dan pengembangan kendaraan listrik. Tindakan retaliatory ini merupakan retribution, khususnya retaliation dalam industri pertambangan antar negara di bawah kerangka WTO yang dilaksanakan oleh suatu negara.

E. Gugatan uni eropa terhadap Indonesia

Karena meningkatnya permintaan kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel, ekspor bijih nikel menjadi salah satu komoditas ekspor yang mencapai puncaknya. Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan ekspor dan larangan komoditas, karena permintaan nikel yang besar di negara ini, termasuk bijih nikel, untuk meningkatkan nilai bijih nikel dan komoditas lainnya. Sebagai reaksi terhadap pembatasan Indonesia dan larangan ekspor bijih nikel, Uni Eropa mengajukan keluhan kepada Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Alasan mengapa GATT / WTO relevan atau relevan sama sekali adalah karena negara-negara sering menggunakan perjanjian perdagangan non-tarif dalam berbagai perjanjian perdagangan. Namun, nontarif cukup efektif dalam mencapai tujuan ketika datang untuk meningkatkan produsen dalam negeri. Selain buram, tindakan nontarif juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan energi persaingan secara perlahan. Mirip

dengan sistem harga yang selalu beroperasi dan tidak bergantung pada mekanisme pass-through. Pasal 10 (1) dari GATT tahun 1994 mengizinkan pengungkapan yang tidak terbatas dari semua peraturan perdagangan yang sah dan hukuman yang sah yang dihasilkan dari peraturan tersebut.

Tanpa negara yang memberitahukan harus menunjukkan dampak kerugian ekonomi yang diderita oleh negara sebagai akibat dari barang impor dari negara lain yang dikenakan subsidi, subsidi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1).

F. Kekalahan Indonesia atas gugatan WTO oleh Uni Eropa

Persidangan akhirnya diadakan pada November 2021, dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh atas kasus UE dan materi pertahanan yang disediakan oleh Indonesia oleh panel sengketa WTO. Uni Eropa berpendapat dalam pengaduannya bahwa Indonesia melanggar persyaratan WTO untuk memberikan akses terbuka ke perdagangan global, termasuk akses ke memiliki akses ke bijih nikel yang belum diproses. Sayangnya, terungkap bahwa Indonesia telah kehilangan bijih nikel pada November 2022. Pada November 2022, sayangnya terungkap bahwa Indonesia telah kalah dalam pertempuran hukum. t kasus pengadilan.

Panel sengketa memutuskan dalam laporan akhirnya bahwa kewajiban ekspor Indonesia untuk memproses dan memurnikan Pasal XI.1 GATT 1994, yang melarang negara anggota WTO memberlakukan pembatasan selain tarif, pajak, atau pungutan lainnya, dilanggar oleh praktik penambangan nikel Indonesia.

Karena cadangan nikel negara yang kecil dan penggunaan praktik pertambangan yang baik, Indonesia berpendapat perlunya peraturan semacam itu. Meskipun kuota, lisensi impor, atau lisensi ekspor dapat ditetapkan atau dikelola oleh pihak mana pun, WTO menolak pembelaan asli Indonesia atas keluhan nikel UE dengan menyatakan bahwa hal itu tidak dapat didukung oleh Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Belakangan, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan tersebut karena putusan majelis belum diberikan kekuatan hukum final dan Indonesia masih sempat mengajukan banding. sebelum Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) mengadopsi keputusan yang disengketakan. Oleh karena itu, kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi bijih nikel tersebut dinilai telah melanggar peraturan WTO, Selain itu, pemerintah Indonesia mengajukan banding atas keputusan panel WTO pada 12 Desember 2022.

G. Pembelaan Indonesia atas Gugatan Uni Eropa

GATT 1994 adalah dasar untuk dasar hukum keluhan UE. Indonesia dapat menawarkan pengecualian dari GATT 1994 sebagai pedoman bagi anggota WTO. Menurut Pasal 20 GATT (1994), negara-negara anggota GATT / WTO diizinkan untuk terus mengambil tindakan yang tidak kompatibel dengan GATT.

Pasal 20 GATT (1994) mengandung celah bagi Indonesia untuk memperoleh pembenaran atas kebijakan eksklusivitasnya, khususnya pada huruf (d), yang meliputi: : *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption* “(berfokus pada perlindungan sumber daya alam yang dapat habis jika kebijakan tersebut diterapkan, seperti membatasi produksi atau konsumsi lokal.;”)

Ketentuan Pasal ini memungkinkan Indonesia memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan hidup dan Sumber daya alam, dalam hal ini kebijakan melarang ekspor bijih nikel. Ada tiga situasi yang dapat digunakan sebagai pembenaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 GATT 1994: Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan pelestarian konservasi sumber daya alam yang habis sebagai tujuan kebijakan mereka. Persyaratan berikut harus dipenuhi:

1. Tindakan harus relevan dengan tujuan kebijakan; dan
2. Langkah-langkah ini harus berhasil ditegakkan "bersamaan dengan" pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri.
3. Terminologi, atau apa yang sering kita pahami, mengacu pada zat seperti minyak, gas, batu bara, atau mineral lainnya.

Oleh karena itu, Indonesia harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia memenuhi tiga standar pasal 20 GATT 1994 secara transparan dengan dukungan yang memadai. Selain itu, pemerintah dapat membuktikan sejumlah poin lain, seperti:

1. Indonesia dapat menunjukkan bahwa masih ada sejumlah besar bijih nikel yang berasal dari negara-negara di luar Indonesia. Sepuluh negara memiliki 77% cadangan nikel dunia, menurut data dari Nickel Institute 2021. Sebelas persen cadangan nikel dunia berada di Indonesia. Karena pasokan yang cukup besar dari negara lain, Indonesia dapat menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikel tidak sepenuhnya memotong pasokan dunia. Untuk mencegah hilangnya bahan mentah dan hanya memperpendek satu rantai industri, Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang telah diproses dan dimurnikan. Fasilitas pemrosesan nikel Uni Eropa dan negara-negara maju lainnya tidak akan sepenuhnya ditutup.
2. Indonesia harus mengamankan pasokan domestik yang cukup, terutama untuk kebutuhan smelter dengan investasi di sana. Indonesia dapat berargumen bahwa untuk menjamin pasokan domestik yang cukup, larangan ekspor bijih nikel juga diperlukan.

H. Kondisi Indonesia setelah kalah dalam gugatan di WTO

Pemerintah Indonesia berdedikasi untuk berkonsentrasi pada pengembangan komoditas hilir karena kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor nikel dinilai

berhasil, terbukti dengan meningkatnya total nilai tambah komoditas nikel pada tahun 2022 dengan jumlah total US\$ 12 miliar atau setara dengan 188 triliun Rupiah.

Selain itu, pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 dan membangun sektor pengolahan dan pemurnian bauksit dalam negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperkirakan harga komoditas yang mengandung nikel akan naik sebesar US\$ 38 miliar atau Rp 592,2 triliun.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejumlah faktor, termasuk keputusan Uni Eropa untuk melarang impor dan ekspor minyak sawit dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, berkontribusi pada ketidaksepakatan atas penghentian sementara ekspor bijih nikel ke Eropa. Kebijakan yang didukung Uni Eropa membatasi pasar minyak sawit, yang berfungsi sebagai bahan baku utama untuk pengembangan biofuel. Hal ini mempengaruhi produk minyak sawit yang diekspor Indonesia ke negara-negara UE dan menyebabkan Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel. Ke Eropa: Indonesia diterima di WTO oleh Uni Eropa, namun Indonesia memiliki sejumlah pilihan lain di bawah peraturan WTO. Ada pengecualian dalam Pasal XX (g) di mana Indonesia harus dapat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak buruk bagi Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barutu, Cristhophorus, 2015, *Seni Bersengketa di WTO (Diplomasi dari Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa Kasus Sengketa antara Indonesia dengan Beberapa Mitra Dagang Anggota WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BBC News Indonesia. 16 Desember 2019. Indonesia gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan, diskriminasi sawit. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421>.
- Izzatyan Suhartono. "Kebijakan Percepatan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel". *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XI, No. 23/1/Puslit/Desember/2019. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember2019-221.pdf.
- Svehla, G., 1996, Vogel : Buku Teks Analisis Anorganik Kuantitatif Makro dan Semimikro, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Terjemahan oleh L. Setiono dan A. Hadyana P., PT. Kalman Media Pusaka, Jakarta
- Dalvi, A.D., Bacon, W.G. and Osborne, R.C., 2004. *The past and the future of nickel laterites*.
- PDAC 2004 International Conference Trade Show and Investors Exchange, Toronto, Canada, March 7–10, Proceedings: Toronto, Canada, Prospectors and Developers Association of Canada, p. 22-27.
- Prasetyo, Puguh. "Sumber daya mineral di Indonesia khususnya bijih nikel laterit dan masalah pengolahannya sehubungan dengan UU Minerba 2009." *Prosiding Semnastek* (2016).

INTERNET

Media Nikel Indonesia, “Jadi Produsen Terbesar di Dunia! Ini 5 Wilayah Tambang Nikel di Indonesia”

<https://nikel.co.id/jadi-produsen-terbesar-di-dunia-ini-5-wilayah-tambangnikel-di-indonesia>

“Bukan Main, Cadangan Nikel Indonesia Ranking 1 Dunia”

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210325104938-4-232739/bukanmain-cadangan-nikel-indonesia-ranking-1-dunia>

Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020

[Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020 | Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora \(penerbit.org\)](#)

Indonesia's Nickel Industry in the Aftermath of Trade Dispute with the European Union

[Indonesia's Nickel Industry in the Aftermath of Trade Dispute with the European Union – Pusat Studi Perdagangan Dunia \(ugm.ac.id\)](#)

Nickel Institute

[About nickel \(nickelinstitute.org\)](#)

Indonesia has a long way to go to produce nickel sustainably

[Indonesia has a long way to go to produce nickel sustainably \(chinadialogue.net\)](#)

The global nickel market is projected to grow from \$36.27 billion in 2021 to \$59.14 billion in 2028 at a CAGR of 7.3% in forecast period, 2021-2028

[Nickel Market Size, Share, Growth & Forecast Report \[2028\] \(fortunebusinessinsights.com\)](#)

Taking a look at investment in nickel production and nickel smelting facilities in indonesia

[Taking a Look at Investment in Nickel Production and Nickel Smelting Facilities in Indonesia | Indonesia Investments \(indonesia-investments.com\)](#)

Lost in Nickel Lawsuit at the WTO, Indonesia Forced to Export Raw Nickel?

[Lost in Nickel Lawsuit at the WTO, Indonesia Forced to Export Raw Nickel? - ADCO Law](#)